



Diskusi Publik Soal Jamu Tradisional di UIN

YOGYA (KR) - Aliansi Mahasiswa Anti Kartel (AMAK) dan Ikatan Mahasiswa Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (Imkap) UIN Sunan Kalijaga, menggelar diskusi publik bertema 'Kemendes dan BPOM Berebut Kuasa Soal Izin Edar: Dampaknya Terhadap Industri Farmasi dan Jamu Tradisional', Kamis (19/12) pagi ini.

Berlangsung di Teaterikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, diskusi menghadirkan empat narasumber, yaitu Walikota Yogyakarta Drs Harjadi Suyuti, Direktur Registrasi Obat Dr Lucia Rizka Andalusia, Ketua Umum Kadin H Eddy Ganefo MM dan Ketua GP Jamu Dr Charles Saerang.



KR-Antri Yudiansyah

Panitia Diskusi Publik saat berkunjung di Redaksi KR, kemarin.

Arifin Kusuma, Ketua IM-KAP saat audiensi di Redaksi KR, Rabu (18/12) kemarin menegaskan, diskusi ini merespons kebijakan Kementerian Kesehatan yang mengambil alih izin edar produk farmasi

yang sebelumnya di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Baik Kemendes maupun BPOM sama-sama mengklaim berhak menerbitkan izin edar berdasarkan undang-undang

yang ada. Terjadi kerancuan dari kedua lembaga negara ini, memperebutkan kuasa atas suatu produk kebijakan.

Dan hal ini diperkirakan akan mempengaruhi industri jamu tradisional yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. "Ini tidak lepas dari banyaknya jenis tanaman herbal di Indonesia yang jumlahnya mencapai 30.000 jenis," kata Arifin.

Tak dipungkiri, jamu tradisional acapkali mengalami masalah terkait izin obat tradisional dan registrasi obat tradisional. Permenkes No 006 tahun 2012 dan Permenkes No 007 tahun 2012 telah menghambat perkembangan industri jamu tradisional di Indonesia. (Yud)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005